

**Penerapan Konsep *Cross Border Regions* (CBRs) Dalam Kerjasama
Ekonomi Sub-regional Indonesia-Malaysia-Singapura *Growth Triangle*
(IMS-GT)**

Yanyan Mochamad Yani

Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Padjadjaran

Email: yan2m@hotmail.com

Yusnarida Eka Nizmi

Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Riau

Email: eka_nizmi@yahoo.com

ABSTRAK

Growth triangle dalam tulisan ini diidentifikasi sebagai sebuah upaya perintisan kerjasama di wilayah ini, yang pembahasannya terbatas pada kerjasama ekonomi antar negara dengan industrialisasi barunya di wilayah ini. Zona *Indonesia-Malaysia-Singapura Growth Triangle* (IMS-GT) ini dipilih karena posisi lintas perbatasan dan karakteristik mereka yang memiliki latar belakang kerjasama sejarah lintas batas yang panjang, memiliki komposisi multi etnis dan secara geografis berdekatan. Elemen-elemen secara umum diidentifikasi sebagai pilar-pilar yang memfasilitasi proses yang menggiring sebuah wilayah menjadi ruang yang dinamis bagi para aktornya untuk secara aktif memainkan peran demi menjamin kepentingan-kepentingan transnasional mereka sendiri. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisa kemunculan dan dinamika perjalanan kesepakatan *Growth Triangle* yang diinisiasi oleh pemerintah Singapura yang melibatkan kepulauan Riau di Indonesia dan juga Johor di Malaysia. Penjabaran difokuskan pada dinamika *Growth Triangle* sebagai sebuah kerjasama sub regional menurut konsep *Cross Border Regions* (CBRs) dan teori regionalisme baru (New Regionalism Theory). Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah kualitatif historis. Penelitian ini menunjukkan bahwa Singapura berperan sebagai region “core” dikarenakan kemampuan keuangan, teknologi dan sumber daya manajerial yang dimilikinya. Johor dan Batam berperan sebagai region “non-core”, yang memiliki ketersediaan lahan, tenaga kerja dan sumber daya-sumber daya lain. Elaborasi ini menunjukkan adanya produksi yang tinggi dari penggabungan tiga teritori ini sebagai *core* maupun *non core*.

Kata Kunci: *Cross Border Regions* (CBRs), *Growth Triangle*, Kerjasama, Teori Regionalisme Baru.

ABSTRACT

Growth Triangle in this paper was identified as a volunteer cooperation among participant countries in this region, which its explanation was on economic cooperation among countries within their new industrialization. Indonesia-Malaysia-Singapore Growth Triangle (IMS-GT) was chosen because of their cross borders and characteristics in having same cross border cooperations background history, same ethnic compositions, and geographically near by each other. Generally the elements are identified as pillars that facilitated the process to lead a region became a dynamic space to its actors actively play their role so that their own transnational interests are guaranteed. This Paper analyse the rising and dynamics of *Growth Triangle* that was initiated by Singapore government which involved Kepulauan Riau in Indonesia and Johor in Malaysia. The Substantial topic focuses on the dynamics of *Growth Triangle* as a sub regional cooperation based on *Cross Border Regions* (CBRs) and *New Regionalism Theory* (NRT). Historical Qualitative was used in this research. This research shows that Singapore plays as a “core region” because of its capability in financial, technology and managerial resources. Johor and Batam as a “non-core region” that has land, abundance of labours, and another resources. This elaboration shows high production from these three territories both core and non-core region.

Keywords: Cooperation, *Cross Border Regions* (CBRs), *Growth Triangle*, *New Regionalism Theory* (NRT).

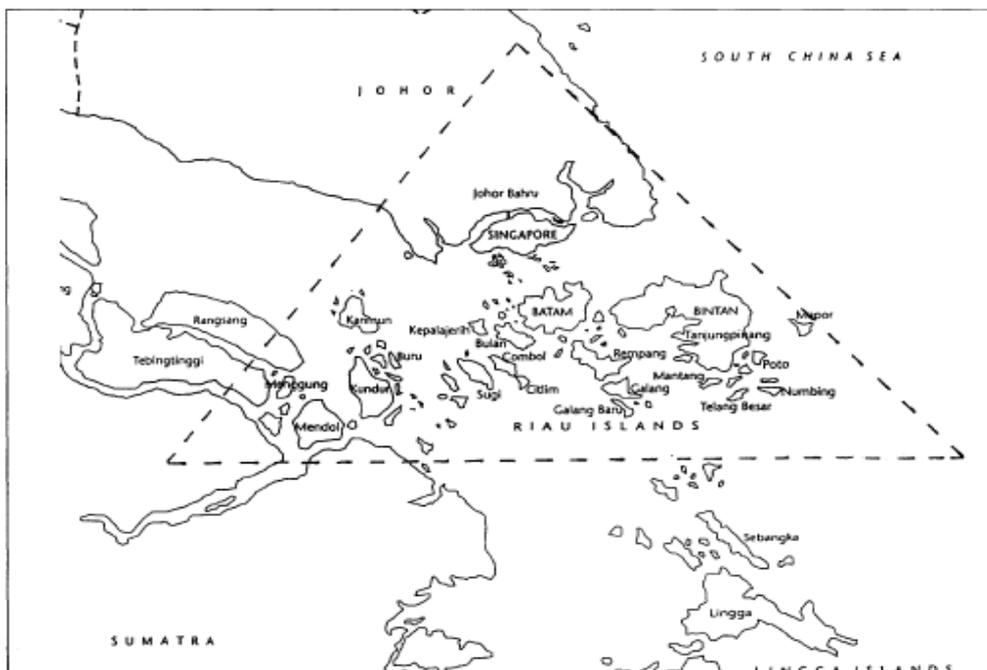
PENDAHULUAN

Berakhirnya Perang Dingin mengurangi ketegangan yang ada antara negara-negara Asia dan konsekuensinya membawa wilayah tersebut kedalam proses globalisasi dan meningkatnya integrasi vertikal. Kompetisi yang terjadi memangkas batasan-batasan nasional dan sektoral dan berkembang menjadi global, perusahaan dimana-dimana dipaksa untuk berubah dari ekspor menjadi produksi internasional. Negara-negara seperti Thailand, Malaysia dan Singapura giat menciptakan strategi-strategi pertumbuhan yang dapat menarik modal asing dan ekspor-ekspor meluas demi pertumbuhan ekonomi dan kehidupan sosial yang baik bagi populasi mereka. Bersamaan dengan kebijakan-kebijakan industrial domestik, negara-negara tersebut juga konsen mempromosikan kesepakatan-kesepakatan regional dengan negara-negara tetangganya. Fenomena ini dikenal sebagai EPZ dan SEZ, seperti halnya zona ekonomi

lintas batas dalam “growth triangle” dan “economic corridor” yang dapat bermanfaat sebagai mekanisme untuk menstimulasi dan bersinergi dengan ekonomi-ekonomi lokal yang ada.

Tulisan ini mengeksplorasi kerjasama ekonomi regional dalam bentuk *growth triangle*, yang populer selama akhir tahun 1980an, dan akan difokuskan pada Indonesia-Malaysia-Singapura *Growth Triangle* (IMS-GT) yang menjadi pionir di Asia Tenggara. Dalam sesi berikutnya, akan dibahas sejarah dan paparan dari IMS-GT. Penulis mencoba untuk menggali apa yang membuat IMS-GT berhasil menjadi model kerjasama dan terus berkembang. Dalam pembahasan selanjutnya, penulis menempatkan sebuah tesis bahwa *Growth Triangle* adalah bagian dari sebuah spektrum dari upaya kerjasama regional dengan pemusatan kepentingan agar menjadi sesuai dengan *global value chain*.

Gambar 1. Indonesia-Malaysia-Singapura Growth Triangle



Kerangka Pemikiran

CBR didefinisikan sebagai sebuah unit teritorial yang terdiri atas unit-unit sub nasional yang bersebelahan dari dua negara bangsa ataupun lebih (Perkmann dan Sum 2002, p. 1). Contoh CBRs yang terkenal termasuk didalamnya: California-Baja California, yang terdiri atas satu negara dari Amerika Serikat dan Meksiko; Washington-Oregon-British Columbia, yang terdiri atas dua negara dan sebuah propinsi dari Amerika Serikat dan Kanada; dan negara Basque, terdiri atas empat propinsi di Spanyol dan tiga di Perancis (Sparke 2000; Garcia- Alvarez dan Trillo-Santamaria 2013).

Menurut Jessop (2012), CBRs muncul sebagai bagian proses ekonomi, politik, dan sosial yang lebih besar sejak tahun 1980an. Selama periode ini, korelasi antara negara bangsa dan pemerintah, termasuk: kondisi kelelahan pasca perang untuk perbaikan ekonomi; berakhirnya Perang Dingin; termasuk perkembangan-perkembangan dalam ekonomi global. Kemudian, hubungan-hubungan ekonomi, politik dan sosial “direstrukturisasi” dalam beragam skala, melibatkan proses-proses makro-regional, seperti UE dan entitas regional lainnya disisi lain, dan proses-proses mikro-regional seperti kawasan-kawasan lintas batas. Namun, ketika lingkup nasional “diturunkan”, baik lingkup makro, nasional, dan mikro pada dasarnya merupakan metode dari strukturisasi hubungan-hubungan ekonomi, politik, dan sosial.

Jessop berpedapat bahwa ada sejumlah alasan dibalik kemunculan CBRs. Diantaranya adalah ekonomi. Beberapa alasan alami lainnya adalah penyebaran dari sebuah kawasan metropolis ke kawasan disekitar periperi (pinggiran), atau revitalisasi dari kawasan ekonomi- seringkali untuk

alasan keamanan. Alasan lain adalah karena digerakkan oleh kebijakan yang ada, seperti promosi yang diberikan oleh CBR yakni akses terhadap modal atau teknologi, atau untuk mengatasi ketimpangan-ketimpangan pendapatan internal, atau untuk mempermudah masuknya dana-dana. Sebagai tambahan, pemerintah juga memperkuat jejaring ekonomi secara langsung maupun tidak langsung melalui berbagai upaya untuk meregulasi jejaring tersebut atau justru mempertahankannya.

Namun, ada juga faktor penggerak non-ekonomi yang dapat menyebabkan CBRs muncul. Kawasan-kawasan ini dapat muncul karena identitas historik dalam sebuah etnisitas secara umum atau bahasa, atau berbagi sumber daya alam, atau karena alasan jalur perdagangan. Atau justru merupakan sebuah proyek *nation-building* yang dilakukan oleh komunitas-komunitas perbatasan tertentu. Ini juga dapat memperkuat entitas supranasional atau organisasi, dalam sebuah upaya untuk mengurangi otoritas tertentu dari negara bangsa (Jessop 2002).

Konsep dari *Cross-Border Regions* (CBRs) menghasilkan perubahan dalam kebijakan dan diskusi-diskusi akademik. Karena persoalan perbatasan adalah hambatan-hambatan nyata yang banyak muncul menjadi persoalan dari teritorial-teritorial negara, kehadiran *integrated cross border* bukanlah sesuatu yang baru. Yang baru dalam kajian ini adalah bahwa konstruksi dari *cross border region* telah menjadi sebuah strategi yang eksplisit lebih digemari oleh beragam kekuatan sosial baik didalam maupun diluar perbatasan wilayah.

Proliferasi dari CBRs sejak tahun 1980an dapat dipandang sebagai pengaruh dari globalisasi, regionalisasi dan akhir dari perang dingin. Kecenderungan-kecenderungan makro

ini meningkatkan mudahnya memasuki perbatasan-perbatasan yang selama ini sulit ditembus dan membuka peluang aktivitas-aktivitas lintas batas. Bukti empiris yang ditunjukkan dalam penelitian ini menunjukkan perbedaan antara CBRs yang dapat dimasukkan sebagai karakteristik dari blok-blok regional yang mereka miliki. Beragam bentuk dari regionalisme yang berbeda menciptakan struktur peluang yang besar baik bagi aktor-aktor lokal maupun regional melakukan kerjasama lintas perbatasan dalam blok-blok regional ini.

Penyebaran dari CBRs dan wacana-wacana yang ada berhubungan erat dengan serangkaian kecenderungan makro yang mempengaruhi status dari perbatasan-perbatasan nasional beberapa tahun terakhir: (a) pertumbuhan aktivitas ekonomi lintas batas melalui peningkatan pergerakan barang, jasa dan orang yang berkontribusi terhadap beragam proses yang pada akhirnya menghasilkan globalisasi; (b) transfer dari interaksi kekuatan-kekuatan negara baik dari dalam maupun ke luar yang semakin membuka peluang bagi interaksi territorialisasi dari kekuatan politik di dunia setelah 1945- dengan integrasi regional diatas level negara menjadi sesuatu yang penting dari akhir tahun 1980an; dan (c) berakhirnya perang dingin dan menghasilkan kecenderungan untuk berintegrasi dari yang dulunya sosialis masuk menjadi kapitalisme global.

Gabungan dari berbagai cara diatas dalam berbagai peristiwa, membawa peluang terhadap struktur perkembangan CBR dalam tiga cara. Pertama, peningkatan perbatasan-perbatasan yang dapat dimasuki yang memberi peluang untuk terjadinya beragam transaksi yang menghasilkan konfigurasi transnasional. Transaksi-transaksi terjadi dari pembangunan jejaring antar perusahaan melalui

kordinasi dan kerjasama publik yang lebih sosial pola interaksinya. Interaksi-interaksi yang didasarkan pada keunggulan masing-masing, menghasilkan banyak hal yang dapat bermanfaat bagi pertumbuhan region.

Kedua, pergerakan negara yang terjadi pada level nasional menuju otoritas supranasional dan subnasional mulai menggeser posisi negara-bangsa yang dulunya sebagai "power containers" utama bagi pemerintahan publik (pernyataan sebagai *power containers*, dapat dilihat di Taylor 1994; *on the relativization of scale*, lihat Collinge 1996). Ini khususnya disebutkan dalam kasus Uni Eropa (EU) dengan blok-blok makroregional lainnya (contohnya APEC) atau yang lebih didominasi oleh kepentingan kekuatan dari satu negara (misalnya AS dalam NAFTA).

Sebagaimana yang diungkapkan oleh para pemerhati "new regionalism", pembangunan EU berkontribusi terhadap pengaburan dari perbedaan modern antara apa yang disebut dengan politik internasional dan apa politik internal (Hettne, Inotai dan Sunkel 1999; Joenniemi 1997). Integrasi Eropa memberikan serangkaian struktur peluang bagi otoritas subnasional untuk berpartisipasi dalam aktivitas-aktivitas internasional. Termasuk : (a) rekrutmen dari otoritas subnasional sebagai mitra implementasi kebijakan dalam bagian otoritas supranasional (Balme 1996), (b) peningkatan peran dari otoritas subnasional dalam formulasi dan implementasi kebijakan-kebijakan luar negeri negara bangsa mereka ("catalytic diplomacy", lihat Hocking 1996), (c) peningkatan kontak internasional secara langsung antar otoritas subnasional, dengan melewati level-level yang superior dari pemerintah ("paradiplomacy", lihat Duchacek *et al.* 1988).

Ketiga, berakhirnya perang dingin meningkatkan upaya-upaya baru dalam

hal transformasi ekonomi di perbatasan-perbatasan sebagaimana adanya upaya umum untuk mengintegrasikan kembali ekonomi-ekonomi paska sosialis masuk pada pasar dunia kapitalis. Kerjasama lintas batas adalah sebuah strategi yang menjanjikan untuk mengeksploitasi peluang-peluang dalam wilayah-wilayah perbatasan yang secara relatif tidak dapat disentuh oleh kapitalisme. Dalam kasus-kasus yang umum, inisiatif diambil oleh otoritas lokal dan regional dalam rangka mengupayakan terbentuknya jejaring dengan arena global atau untuk memobilisasi sumber daya-sumber daya yang ditawarkan oleh badan-badan supranasional dan internasional dalam rangka pertukaran kerjasama dengan pihak-pihak mereka yang berlokasi di wilayah-wilayah yang berdekatan (lihat Jessop 1995)

Bagi para aktor lokal, inisiatif-inisiatif seperti ini memberi peluang untuk memperkuat posisi mereka *vis-a-vis* otoritas negara inti mereka. Hal ini tidak dapat dibantah ketika mereka dapat merekrut sumber daya-sumber daya dari pihak ketiga, seperti otoritas supranasional atau organisasi internasional. Perluasan dari CBRs dan inisiatif-inisiatif yang lain untuk mempromosikan kerjasama lintas batas muncul sebagai sebuah respon terhadap perubahan-perubahan ini.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif historis. Kualitatif historis adalah pendekatan metodologis yang menempatkan kualitatif maupun pengukuran kuantitatif dan menggunakan dokumen historis atau interpretasi sejarawan untuk menggunakan dan menguji teori (Thies, 2002). Sumber data yang menjadi rujukan dalam penelitian ini adalah dokumen, jurnal, dan wawancara. Proses analisis data yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada Thies (2002) yaitu menyeleksi sumber, menentukan sumber utama dan menentukan sumber sekunder.

PEMBAHASAN

Melihat Lebih Dekat *Growth Triangle*

Apa sesungguhnya *Growth Triangle*? Dalam pandangan Myo Thant et al. (1994), *Growth Triangles* adalah zona ekonomi transnasional melewati batas geografi, meliputi tiga atau lebih negara, perdagangan eksternal dan menarik investasi kedalam. Biasanya merupakan blok-blok perdagangan sub-regional yang mengeksploitasi komplementaritas antar wilayah-wilayah yang berdekatan dari negara-negara yang berbeda secara geografi untuk mendapatkan keuntungan dari kompetisi ekspor (Scalapino, 1992; Chia and Lee, 1992).

Tabel 1.
Growth Triangles di Asia

Name of Growth Triangle	Area Covered
The Southhern China Growth Triangle	Hong Kong, China's Guangdong and Fujan Provinces and Taiwan
The Indonesia-Malaysia-Singapore Growth Triangle (IMS-GT)	Singapore, Johor, Pahang, and Malacca states o Malaysia and Riau Province of Indonesia
The Bath Zone	Border areas of Thailand, Laos, Cambodia and Myanmar
The Yellow Sea Economic Zone	Coastal areas facing the Yellow Sea of north and north-east China, north and south Korea and Japan
The Japan Sea Economic Zone	Coastal areas of north-east China, far east Rusia, south and north Korea and Japan
The East ASEAN Growth Area (EAGA)	Brunei, parts of the Philippines, Indonesia and east Malaysia
The Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT)	Southern Thailand, nothern Malaysia and two Indonesian provinces in Sumatera
The Tumen River Delta	Parts of China, north Korea and Rusia

Sources: Islam and Chowdhury (1997); Sato (1994)

Sebuah *Growth Triangles* secara umum melibatkan bagian-bagian dari negara-negara yang berpartisipasi (kecuali negara-negara kecil seperti Hong Kong, Singapura dan Brunei) dan biasanya negara-negara ini berada pada tahapan yang berbeda dari pertumbuhan ekonomi. Salah satu karakteristik inilah yang dimiliki *Growth Triangle* yang diciptakan oleh pemerintah-pemerintah yang terlibat. Ada kesepakatan besar dari koordinasi dan perencanaan antara agensi-agensi pemerintah. perencanaan ini diperlukan untuk meyakinkan bahwa *Growth Triangle* memang layak diharapkan bagi negara-negara yang berpartisipasi.

Setiap *Growth Triangle* memiliki dua kelompok negara. Kelompok pertama adalah *investing countries* dan yang kedua adalah *receiving countries*. Pada umumnya, kelompok yang membentuk mensuplai modal, teknologi dan kemampuan manajemen bagi *receiving group*. *Investing group* biasanya adalah kelompok yang mencari tempat dengan biaya murah karena tingginya biaya tenaga kerja yang membuat sulit untuk beroperasi di pasar domestik mereka. *Recipient group* disisi lain, mensuplai tenaga kerja baik yang memiliki keterampilan maupun yang tidak memiliki keterampilan, tanah dan sumber daya alam lainnya. Ekonomi dari

investing countries biasanya lebih maju/industrianya lebih maju dibanding *receiving countries*, meskipun pada beberapa kasus seperti Malaysia dan Singapura, keduanya merupakan *receiving* dan *investing countries* sekaligus. Dalam konteks ini, *Growth Triangles* mengeksploitasi mobilitas dari modal interanasional dan *comparative advantage* dari biaya tenaga kerja murah (Myo Thant et al., 1994: 9).

Growth Triangles muncul karena memiliki peluang besar akan arus *foreign direct investment* (FDI) dan perubahan-perubahan dalam *direct investment* di Asia Timur dan Asia Tenggara. Pada tahun 1960an, *newly industrializing economies* (NIEs) menarik investasi asing dalam industri-industri yang berorientasi ekspor dengan jumlah tenaga kerja yang intensif. Pergerakan ekonomi ini menarik FDI terutama yang berbasis pada upah tenaga kerja murah dan kehadiran kebijakan-kebijakan yang pro bisnis dan investasi. Industri-industri yang berbasis tenaga kerja ini sekarang ditransformasi kedalam NIEs. Penerimaan dari status NIE membawa pada peningkatan kompetisi terhadap upah dan biaya produksi. Banyak dari industri-industri yang berbasis tenaga kerja direlokasi ke tempat-tempat yang memiliki upah rendah dalam wilayah tersebut. Sebuah *Growth Triangle* menciptakan peluang bagi industri-industri yang berbasis tenaga kerja untuk direlokasi ke negara tetangga yang memiliki ketersediaan tenaga kerja yang berlimpah.

Chia dan Lee (1994) dan Rodan (1993) membahas keuntungan dari konsep *Growth Triangles*. Dalam terminologi *human resource* (HR), ada satu keuntungan yang paling signifikan bagi negara-negara yang terlibat (dalam *Growth Triangle*) dengan ketersediaan tenaga kerja. Dalam jangka panjang, negara-negara yang miskin modal mungkin dapat menikmati keuntungan transfer teknologi dan peningkatan

keterampilan, dan peluang tenaga kerja yang diciptakan oleh *Growth Triangle* akan menghasilkan peningkatan keterampilan dalam tenaga kerja. Lee (1991) memiliki pandangan terhadap kesuksesan sebuah *Growth Triangle* setidaknya harus memiliki empat persyaratan yaitu komplementaritas ekonomi, keunggulan geografi, komitmen politik yang kuat dan koordinasi kebijakan diantara negara-negara yang berpartisipasi, serta fasilitas infrastruktur yang berimbang.

Dalam konteks komplementaritas, Lee (1991) menjelaskan bahwa ini berasal dari ide ekonomi tradisional *comparative advantage*. Dalam terminologi *comparative advantage* terlihat bahwa masing-masing negara anggota, dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang berbeda dan memiliki perbedaan dalam sumber daya. *Growth Triangles* cenderung untuk menggabungkan wilayah urban, pinggiran, kurang berkembang dan wilayah-wilayah dengan *income* yang rendah. Sebagaimana yang disebutkan diatas, *investing countries* dalam *Triangle* biasanya memiliki industri-industri yang berkembang dan tenaga kerja yang memiliki keterampilan serta pasar keuangan dan juga infrastruktur yang baik, sementara di sisi *recipient countries* ada ketersediaan fasilitas-fasilitas seperti tenaga kerja yang berlimpah namun minim keterampilan dan sumber daya alam. Aspek lain dari komplementaritas ekonomi dalam *Growth Triangle* adalah perbedaan dalam level teknologi dan kualitas dalam pengalaman personal. Dalam sebuah *Growth Triangle*, teknologi dan individu dapat ditransfer dengan mudah ke wilayah-wilayah dimana faktor-faktor ini minim ketersediaannya.

Pada beberapa level tertentu pertumbuhan, keunggulan geografi diyakini sebagai keuntungan-keuntungan substansial. Hal ini mungkin tidak penting dalam kasus dimana

perkembangan ekonomi menjadi lebih berbasis jasa. Contohnya, dengan meningkatnya kemajuan telekomunikasi dan pertumbuhan telekomunikasi, keunggulan geografi tidak menjadi begitu kritical di masa depan seperti perkembangan *software* dan jasa keuangan (Lee, 1991).

Hal lain yang menjadi kebutuhan dalam pelaksanaan kerjasama *Growth Triangle* adalah adanya keterlibatan pemerintah nasional untuk mengembangkan dan menerapkan kebijakan-kebijakan yang tepat di wilayah-wilayah tersebut seperti dalam hal regulasi tenaga kerja, tarif, investasi asing dan lain sebagainya. Tantangan terbesar disini adalah bahwa dalam hampir semua kasus hanya bagian-bagian dari negara-negara yang berpartisipasi di *Growth Triangles* dan pemerintah nasional dari pemerintah negara untuk mempertimbangkan dampak dari kebijakan-kebijakan tersebut diluar wilayah *triangle*.

Namun, apakah infrastruktur menjadi sebuah syarat sebelum memulai kesepakatan menjadi pertanyaan. Dalam banyak kasus, *investing countries* bertanggung jawab terhadap perkembangan infrastruktur (seperti yang dilakukan Singapura di Batam dan kepulauan Riau), meskipun ada sedikit keraguan bahwa *Growth Triangle* dengan infrastruktur fisik yang belum sempurna akan tetap dimulai. Demikian juga halnya dengan ketersediaan sumber daya manusia, karena ketidakterediaan tenaga kerja yang memiliki keterampilan pada dasarnya merupakan keharusan (Toh dan Low, 1994).

IMS- Growth Triangle

Kelahiran IMS-GT harus dilihat dalam konteks keinginan Singapura akan pertumbuhan. Keinginan tersebut berasal keinginan perdana menteri dari konsep *triangle* yang secara esensial membutuhkan pertumbuhan diluar

kapasitas Singapura sebagai kepulauan kecil dengan aktivitas ekonomi yang tinggi. Kesuksesan kebijakan ekonomi Singapura menekankan pada faktor-faktor produksi, khususnya tanah dan tenaga kerja. Dalam beberapa tahun terakhir, Singapura menjadi saksi atas pengurangan tenaga kerja dan tingginya biaya upah dalam pasar tenaga kerjanya (Cunningham dan Debrah, 1996). Ketatnya tenaga kerja membuat rekrutmen menjadi sesuatu yang sulit dan mahal (Debrah, 1993). Ditambah lagi, *Multinational Corporations* (MNCs) jika ingin lanjut beroperasi di Singapura, ada penurunan yang terjadi akan tersedianya tenaga kerja yang memiliki keterampilan. Selain itu, biaya untuk membangun pabrik, dan pusat-pusat distribusi terus meningkat di Singapura, karena keterbatasan tanah yang dimiliki Singapura.

Pemerintah Singapura juga bertujuan untuk menguatkan sektor manufaktur domestik dan sektor-sektor jasa. Namun bagaimanapun, Kumar (1994) mencatat bahwa ketersediaan sumber daya seperti air, tanah dan tenaga kerja, seringkali mengalami keterbatasan untuk perluasan industri manufaktur, pariwisata dan jasa. Singapura menghadapi peningkatan kompetisi dalam produksi yang berorientasi ekspor dari Malaysia, Thailand dan Filipina, produk-produk Singapura harus diakui jelas mendapatkan ancaman (Ng dan Wong, 1993; Straits Times, 1997).

Pemerintah Singapura secara aktif memperkuat perusahaan-perusahaan untuk merelokasi industri-industri mereka yang berbasis tenaga kerja ke negara-negara ASEAN lainnya. Pada waktu yang bersamaan, pemerintah Singapura juga berkeinginan kuat untuk berinvestasi di wilayah Asia Timur sebagai bagian dari upaya regionalisasi Singapura untuk melebarkan sayap demi pertumbuhan ekonominya (Debrah dan

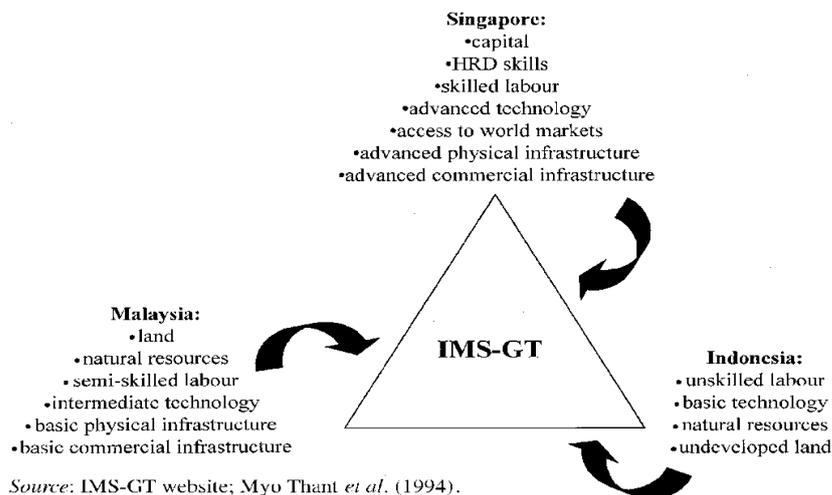
Slansky, 1993; Tan, 1995). Ini berlawanan dengan latar belakang yang ada bahwa IMS-GT yang secara resmi diciptakan Januari 1992. Sebagai tambahan, *triangle* melibatkan seluruh kepulauan Riau Indonesia, termasuk pulau-pulau utama Batam, Bintan, Bulan, dan Singkep (Ahmed, 1992), dan negara bagian Johor, Pahang dan Malaka (dua wilayah ini secara industri memang kurang berkembang) di Malaysia. Totalnya, *triangle* meliputi seluruh wilayah yang berkisar 564.000 kilometer, dengan populasi mencapai lebih dari 35 juta. Untuk detail geografi dari *IMS Growth Triangle*, lihat tabel 2.

Konsep *Growth Triangle* memberi ruang pada Singapura untuk memperluas ekonominya secara geografik dengan memperluas industri ke negara tetangganya. Selanjutnya, konsep ini juga memberi ruang penyebarluasan sektoral dan pengurangan ketergantungan terhadap negara-negara tetangganya (Rodan, 1993). Dalam pandangan Chia

dan Lee (1994) *Growth Triangle* harus dipandang dalam terminologi sebuah penyebaran dari metropolitan (Singapura) dalam rangka pencarian lahan.

Indonesia adalah negara kepulauan (*Archipelagic State*) terbesar di dunia yang terdiri dari 17.499 pulau dan terletak pada posisi silang dunia, yaitu diantara dua samudera dan dua benua. Dengan dua pertiga luas wilayah yurisdiksi berupa perairan yang luasnya mencapai 5,8 juta km² dan panjang garis pantai yang mencapai ± 81.000 km. Fakta ini menjadikan negara Indonesia sebagai negara yang memiliki sumber kekayaan alam yang berlimpah dan sangat bermanfaat bagi kelangsungan hidup bangsa (Haryanto, 2015). Dalam konteks kepulauan Riau, jelas kekayaan alam yang berlimpah, ketersediaan lahan, ketersediaan suplai air, menjadikan pulau ini memiliki daya tarik yang luar biasa bagi Singapura untuk menjadikannya *partner* kerjasama subregional.

Gambar 2.
Komplementaritas *IMS-Growth Triangle*



Kumar (1994) berpendapat bahwa *comparative advantage* muncul dari perbedaan yang dimiliki dalam beragam faktor sebagai komplementaritas dibanding kompetisi dalam tiga wilayah

yang masuk dalam *triangle*. Misalnya, Johor memiliki tanah dan tenaga kerja yang berketerampilan medium; Singapura memiliki infrastruktur yang sudah mapan dan tenaga kerja yang

mumpuni dalam hal keterampilan (namun mahal) biaya; Riau memiliki ketersediaan lahan dan tenaga kerja murah. Ini diasumsikan bahwa komplementaritas ekonomi dari tiga wilayah ini membuat IMS-GT lebih menarik bagi para investor secara keseluruhan dibanding faktor-faktor lain yang memisahkannya (Yeoh, et al., 1992; Naidu, 1994). Gambar 2 memaparkan komplementaritas yang ada dalam IMS-GT sekaligus daya kompetisi yang ada di dalam IMS-GT tidak hanya bagi para investor luar namun juga bagi tiga negara yang terlibat di dalamnya.

Naidu (1994) mengelaborasi komplementaritas ekonomi ini. Menurut

pemikirannya, keuntungan Singapura bersandar pada manajerialnya dan keahlian yang dimiliki para profesionalnya dan jejaring transportasi dan telekomunikasinya yang sudah berkembang dengan sangat baik. Selain itu, Singapura juga memiliki modal yang cukup, hubungan baik dengan pasar-pasar internasional, serta teknologi yang modern (Kraar, 1992). Namun Singapura memang tidak mampu bersaing dalam hal ketersediaan tenaga kerja dan lahan. Johor dan Riau, menawarkan harga yang kompetitif terkait dengan tanah dan tenaga kerja.

Tabel 2
Comparative advantages di Indonesia-Malaysia-Singapore Growth Triangle

<i>Key business sector/ activity</i>	<i>Singapore</i>	<i>Johor and other Malaysian states/Riau Archipelago (Indonesia)</i>
Electronic and procurement sector	Major regional manufacturing base and international procurement office	Lower labour and costs advantage for labour- and land-intensive assembly operations
Petroleum sector	Whole range of petroleum activities such as refining, processing, trading, storage and distribution	For example, Karimum Island on Riau Island provides isolated and environmentally safe space for storage of oil
Maritime activities	Provides full range of shipbuilding and maintenance facilities	Provides suitable sites for shipbuilding and repairs
Regional business and telecommunication services	Acts as operational HQs for many leading MNCs and provides world-class infrastructure for information technology and wide range of business services	Co-ordinates wide range of marketing, manufacturing, technical and procurement activities for MNCs
Logistics and distribution activities	Provides world-class transportation (air and sea) and telecommunication facilities and logistics management services	Produces a wide range of export manufacturing products for transportation and logistics management support systems
Research and development facilities	Availability of large pool of highly skilled human resources in fields such as engineering, R&D and science suitable for MNCs	MNC products which require applied R&D and design for local market adaptations and MNC operations that need process adaptation and improvement R&D
Tourism sector	World-class air and sea travel facilities; cosmopolitan shopping facilities and multicultural nation	Attractive tourist attractions such as beach resorts, golf facilities and cultural diversity
Agribusiness sector	Strength in food processing, biotechnology and R&D facilities	Plenty of land resources for agriculture and different types of farming

Sources: Kumar (1995); Wong (1992); Naidu (1994)

Dari tabel diatas dapat dipahami bahwa dimensi komplementaritas yang ada di IMS-GT sekaligus menjadi dimensi kompetisi bagi ketiga negara yang

berpartisipasi di dalamnya. Kompetisi yang terjadi di ketiga negara dalam perjalanan IMS-GT (SIJORI) menjadi persoalan tersendiri.

Dalam menjelaskan secara logis dalam mengidentifikasi pertumbuhan dari *Growth Triangle* antara Johor-Singapura-Kepulauan Riau (Batam), ekonom Kumar dan Lee (1991, p. 7-9), berpendapat bahwa “comparative advantages” yang muncul dalam beragam faktor, saling melengkapi dari negara-negara yang bergabung dalam *triangle*. Singapura memiliki kualitas tinggi dalam hal sumber daya manusia dan infrastruktur yang memadai; Johor memiliki sumber daya tanah dan tenaga kerja semi-terampil; Riau memiliki sumber daya lahan yang luas dan tenaga kerja murah. Operasional dengan teknik tinggi dapat ditempatkan di Singapura, proses-proses yang tidak terlalu membutuhkan teknik tinggi dapat dilakukan di Johor, dan sektor yang memerlukan tenaga kerja dapat dioperasionalkan di Batam. Komplementaritas ini akan diuji nantinya, apakah membawa keuntungan bagi Indonesia atau justru membawa banyak kerugian dalam implementasi pelaksanaan kesepakatan *Growth Triangle*.

CBRs dan IMS-Growth Triangle

Konsep dari *cross border regions* (CBRs) menghasilkan perubahan dalam kebijakan. CBRs adalah sebuah unit teritorial yang melibatkan unit-unit subnasional dari dua atau lebih negara bangsa (Perkmann dan Ngai-Ling Sum, 2002). Karena persoalan perbatasan adalah hambatan-hambatan nyata yang banyak muncul menjadi persoalan dari teritorial negara. Kehadiran *integrated cross border* bukanlah sesuatu yang baru. Yang baru dalam kajian *cross border regions* ini adalah bahwa konstruksi dari *cross border regions* telah menjadi sebuah strategi yang secara eksplisit lebih digemari oleh beragam kekuatan sosial baik didalam maupun diluar perbatasan wilayah.

Teritori-teritori yang terlibat dalam *Growth Triangle* terdiri dari negara kota

Singapura dan negara bagian Johor yang masih bagian dari negara Malaysia serta kepulauan Riau (Batam) yang terletak di Indonesia. Sejak 1989 ketika konsep *Growth Triangle* secara resmi diumumkan, ada sejumlah kebijakan yang mengalami perubahan untuk pertumbuhan di Batam dan lima pulau disekitarnya. Ketika di wilayah lain Indonesia ada persyaratan ketat untuk penanaman investasi dimana kepemilikan saham domestik harus mencapai 51% dalam kurun waktu 15 tahun, 100 persen kepemilikan asing diizinkan untuk destinasi Batam (Pangestu 1991, p. 78).

Dalam konteks hubungan antara Johor dan Singapura, sudah berlangsung sejak zaman kolonial dan berlanjut dengan perjanjian-perjanjian bilateral. Salah satu contoh perjanjian yang sudah ada adalah penjualan air dari Johor ke Singapura. Penjualan air yang dilakukan oleh Johor ke Singapura berkontribusi 20% terhadap pendapatan negara (Kamil, Pangestu dan Fredericks 1991, p. 68). Sebuah kesepakatan yang dibuat pada tahun 1962 mengizinkan Singapura untuk mendapatkan 250 juta galon air per hari dari sungai Johor. Pada tahun 1990, sebuah kesepakatan baru di tandatangani dan harga air di negosiasi ulang.

Kesepakatan baru ini menegosiasi pembelian air dari Johor, pemerintah Singapura telah menandatangani sebuah perjanjian 50 tahun dengan Indonesia untuk memberi air dari Bintan, salah satu kepulauan Riau yang masuk dalam *Growth Triangle*. Tidak mengejutkan, perjanjian dalam konsep *Growth Triangle* memang memberikan keuntungan tambahan bagi Singapura (Kamil, Pangestu dan Fredericks 1991, p. 69).

Evaluasi awal dari *Growth Triangle* yang dapat dilihat adalah bahwa banyak sekali keuntungan untuk Singapura dan perusahaan-perusahaan Singapura meskipun sulit untuk dipercaya baik

Johor maupun Indonesia akan masuk dalam kesepakatan tersebut tanpa melihat adanya keuntungan bagi mereka sendiri. Argumen diatas memberi penjelasan fundamental untuk mempertimbangkan keuntungan bersama yang muncul dari integrasi ekonomi yang diusulkan dalam *Growth Triangle*.

Konsep umum yang harus dipahami adalah ketika sebuah negara secara ekonomi kurang berkembang, maka akan lebih rentan bagi negara tersebut mengalami eksploitasi yang dikenal dengan "perburuan lahan kosong". Teori *hinterland* adalah salah satu bentuk dari kolonialisme melalui ekspansi ekonomi (Woodward, 1996). Bentuk kolonialisme ini dapat divisualisasikan sebagai bentuk "food chain" dari pertumbuhan ekonomi dimana secara ekonomi, negara-negara predator memerlukan sumber daya dari negara-negara yang lebih lemah atau kurang berkembang.

PENUTUP

Proses pembentukan IMS-GT (SIJORI) dipicu oleh gelombang globalisasi dan regionalisasi yang sedang melanda banyak kawasan. Berakhirnya perang dingin menjadi simbol kemunculan berbagai kerjasama subregional (mengacu pada teori regionalisme baru). IMS-GT yang beranggotakan Singapura, Johor (Malaysia) dan Riau menjadi salah satu kerjasama sub regional yang pada awal kemunculannya di tahun 1989 menjadi perintis bagi kerjasama sub regional lainnya di kawasan Asia Tenggara. Pada perjalanannya, IMS-GT memiliki dua dimensi yang sulit untuk dipisahkan yaitu komplementaritas sekaligus kompetisi yang menjadi persoalan tersendiri bagi perkembangan IMS-GT (SIJORI). Dua dimensi ini menyebabkan terjadinya eksploitasi sekaligus kerjasama diantara negara-negara yang berpartisipasi dalam

kerjasama sub-regional IMS-GT (SIJORI) sejak kemunculannya pada tahun 1989.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Chia, S.Y. dan Lee, Tsao-Yuan (1994). *Subregional Economic Zones in South East Asia*. Dalam Garnaut, R. Drysdale, P. dan Kunkel, J. (eds) *Asia Pacific Regionalism: Readings in International Economic Relations*: Pymble, Australia: Harper Educational Publishers.
- Collinge, C. (1996) *Spatial Articulation of the State: Reworking Social Relations and Social Regulation Theory*, Working Paper of the Centre for Urban and Regional Studies, University of Birmingham.
- Debrah, Y.A. (1993) Strategies for Coping with Employee Retention Problems in Small and Medium Enterprises (SMEs) in Singapore. *Entrepreneurship, Innovation and Change*, 2 (3) : 273-305.
- Debrah, Y.A. dan Slansky, N (1993), " The Making of an International Manager: What can Singapore Learn from Japan". Dalam Czerkawski, C (ed) *Japaneses Management: Challenge and Applications for Business Executives*. Hong Kong: Academic Press, pp. 121-51.
- Duchacek, I., Latouche, D. and Stevenson, G. (1988) *Perforated Sovereignties and International Relations: Transovereign Contacts of Subnational Governments*, Westport, CT: Greenwood.
- Jessop, Bob. (2002). " The Political Economy of Scale". In *Globalization, Regionalization, and Cross Border Regions*, Edited by M. Perkman and N. Sum. Basingstoke: Palgrave Macmilan.
- Joenniemi, P. (1997). *Interregional Cooperation and a New Regionalist Paradigm'*, in Ganster, P., Sweedler, A., Scott, J., and Eberwein, W-D. (eds) *Borders and Border Regions in Europe*

- and North America, San Diego, CA: San Diego University Press.
- Kamil, Y.; Pangestu, M.; Frederick, C.: (1990). A Malaysian Perspective. Dalam Lee Tsao, Y. (ed.), *Growth Triangle: The Johor-Singapore-Riau Experience*. Institute of Southeast Asian Studies and Institute of Policy Studies: Singapore.
- Kumar, S.; Lee Tsao, Y.: (1990). A Singapore Perspective. Dalam Lee Tsao, Y. (ed.), *Growth Triangle: The Johor-Singapore-Riau Experience*. Singapura: Institute of Southeast Asian Studies and Institute of Policy Studies, pp. 3-36.
- Pangestu, M.: An Indonesian Perspective. (1990). Dalam Lee Tsao, Y. (ed.), *Growth Triangle: The Johor-Singapore-Riau Experience*. Singapura: Institute of Southeast Asian Studies and Institute of Policy Studies, pp. 77-115
- Perkmann Markus dan Ngai-Ling Sum. (2002). *Globalization, Regionalization and Cross Border Region*. NY: Palgrave MacMillan.
- Rodan, G. (1993). Reconstructing Division of Labour: Singapore's New Regional Emphasis. Dalam Higgott, R., Leaver, R dan Ravenhill, J. (eds) *Pacific Economic Relations in the 1990s: Conflicts or Co-operation?*. Sydney: Allen & Unwin.
- Sato, M. (1994) Preface. Dalam Myo Thant, Min Thang dan Kakazu, H. (eds). *Growth Triangles in Asia: A new Approach to Regional Economic Co-operation*. Manila: ADB, pp. Xi-xii.
- Yeoh, C. C.; Funkhouser; Lau, G.T.; Goh, M. (1993). "Growth Traingle"- a feature based on interview with Ooi, Giok-Ling published in "Multi- disciplinary R&D in NUS 1993", National University of Singapore.
- Yeoh. C., Lau, G.T.Goh, M. Dan Richardson, J. (1992) *Strategic Business Opportunities in the Growth Triangle*. Singapore: Longman.
- Jurnal**
- Cunningham, B. Dan Debrah, Y.A (1995). Skills for Managing Human Resources in a Complex Environmnet. *International Journal of Human Resource Management*, 6 (1): 79-101.
- Haryanto, Agus. (2015). Faktor Geografis dan Konsepsi Peran Nasional Sebagai Sumber Politik Luar Negeri Indonesia. *Jurnal Hubungan Internasional*, vol 4. 136-147.
- Hettne, B., Inotai, A. and Sunkel, O. (eds) (1999) *Globalism and the New Regionalism*, vol. 1 (London: Macmillan) 1-24.
- Hettne, B. And Soederbaum, F (2000). Theorising the rise of regionness. *New Political Economy* 5 (93): 457-72.
-, (1998). The New Regionalism Approach. *Politeia*, Vol. 17, No. 3.
- Hocking, B. (1996). Bridging Boundaries: Creating Linkages. Non-central Government and Multilayered Policy Environments. *WeltTrends* 11: 36-51.
- Islam, I. Dan Chowdhury, A. (1997). *Asia Pacific Economies: A Survey*. London: Routledge.
- Jessop, B. (1995). Regional Economic Blocs, Cross-Border Cooperation and Post-Socialism: Policies and Prospects. *American Behavioral Scientist* 38(5): 674-715.
- Kumar, S (1994). Johor-Singapore-Riau Growth Triangle: A Model of Subregional Co-operation. Dalam Thant, Myo Min Tang dan Hiroshi Kakazu (eds) *Growth Triangles in Asia: A New Approach to Regional Economic Co-operation*, Hong Kong: ADB dan Oxford University Press, pp. 175-242.
- Lee, T.Y. (ed) (1991) *Growth Triangles: The Johor-Singapore-Riau Experience*. Singapore: Institute of South East

- Asian Studies and Institute of Policy Studies.
- Myo Thant, Min Thang dan Kakazu, H. (eds) *Growth Triangles in Asia: A New Approach to Regional Economic Co-operation*. Manila: ADB.
- Naidu, G. (1994). Johor-Singapore-Riau Growth Triangle: Progress and Prospects. Dalam Myo Thant, Min Thang dan Kakazu, H. (eds) *Growth Triangles in Asia: A New Approach to Regional Economic Co-operation*. Manila: ADB, pp. 218-42.
- Ng, C.Y. dan Wong, P.K (1993). The Growth Triangle: A Market Driven Response?. Dalam *Asia Club Papers*. Tokyo: Tokyo Club Foundation for Global Studies.
- Tan, C.H. (1995) *Venturing Overseas: Singapore's External Wing*. Singapore: McGraw-Hill.
- Taylor, P. (1994) The State as Container: Territoriality in the Modern World System. *Progress in Human Geography* 18(3): 151-62.
- Thies, Cameron G. (2002). "A Pragmatic Guide to Qualitative Historical Analysis in the Study of International Relations". *International Studies Perspectives* (2002) 3 : 351-372.
- Toh, M.H. dan Low, L (1994). Human Resource Development in the Asia Pacific: Issues, Challenges and Responses. *Research and Practice in HRM*, 2 (1): 47: 66.
- Woodward.H. Katharine. (1990). Neo-Colonialism, Labor Rights, and the "Growth Triangle" of Indonesia, Malaysia, and Singapore: Who Will Protect the " Hinterland" and Indonesia's Workers?. *Dickinson Journal of International Law Vol. 15* 1999.
- Paper/ Working Papers**
- Ahmad, M (1992). Economic Co-operation in Southern Growth Triangle: An Indonesian Perspective. paper presented at the Conference on Regional Cooperation and Growth Triangles in ASEAN, Centre for Advance Studies National University of Singapore, 23-4 April.
- Surat Kabar**
- (1997, 26 April). Singapore and Malaysia: The Race is on. *Straits Times*
- Kraar, L. (1992, 5 October). Asia's Hot New Growth Triangle. *Fortune*. 54-7.